



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 3 (2025) pp: 8181-8188

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Manajemen Laba di Era Digital: Analisis Hubungan antara Perencanaan Pajak dan Beban Pajak Tangguhan

Shabrina Ayu Rizky, Asmaul Husna

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

shabrinaayuu25@gmail.com, asmaulhusna@umsu.ac.id

Abstrak

Penelitian ini berfokus pada analisis mendalam mengenai keterkaitan antara strategi perencanaan pajak dan pengakuan beban pajak tangguhan terhadap praktik manajemen laba pada perusahaan subsektor farmasi. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi literatur yang menitikberatkan pada sintesis hasil penelitian sebelumnya, baik dari konteks nasional maupun internasional. Data dikumpulkan melalui telaah sistematis terhadap artikel ilmiah dan publikasi akademik terakreditasi yang terbit pada periode 2015–2024 dan membahas aspek perencanaan pajak, beban pajak tangguhan, serta implikasinya terhadap transparansi pelaporan keuangan. Analisis dilakukan dengan metode tematik untuk menemukan pola konseptual, perbedaan pandangan, serta faktor yang memengaruhi keterhubungan antarvariabel. Hasil kajian menunjukkan bahwa perencanaan pajak umumnya dimanfaatkan sebagai sarana untuk mengelola kewajiban fiskal secara efisien tanpa mengurangi keandalan laporan keuangan. Namun demikian, praktik perencanaan pajak yang bersifat agresif dapat berpotensi mendorong munculnya tindakan manajemen laba. Selain itu, beban pajak tangguhan kerap mencerminkan adanya perbedaan temporer dalam pengakuan laba yang memungkinkan terjadinya manipulasi kinerja keuangan secara halus. Temuan penelitian ini menekankan pentingnya penerapan prinsip transparansi, etika profesional, dan pengawasan regulatif guna memperkuat integritas pelaporan keuangan di industri farmasi.

Kata kunci: Perencanaan, Tangguhan, Manajemen, Farmasi

1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mendorong transformasi signifikan dalam sistem pelaporan keuangan perusahaan. Di tengah dinamika ekonomi digital dan kompetisi global, perusahaan dituntut untuk menyajikan laporan keuangan yang tidak hanya akurat, tetapi juga mampu merefleksikan strategi, efisiensi, serta daya saing keuangan yang berkelanjutan (Gulo & Mappadang, 2022). Dalam konteks tersebut, praktik manajemen laba menjadi salah satu strategi yang sering digunakan manajemen secara legal dan sesuai standar akuntansi. Praktik ini tidak selalu dimaknai sebagai upaya manipulatif, melainkan sebagai bentuk pengelolaan laba untuk menstabilkan kinerja, menarik minat investor, serta mengoptimalkan efisiensi fiskal perusahaan. Laporan keuangan pada dasarnya merupakan instrumen utama dalam menilai kondisi dan kinerja keuangan suatu entitas dalam periode tertentu.

Manajemen laba merupakan tindakan strategis yang dilakukan oleh manajemen untuk menyajikan informasi laba sesuai kebijakan akuntansi yang berlaku. Jika dilakukan secara etis dan transparan, praktik ini dapat memberikan gambaran yang lebih stabil dan informatif mengenai kinerja ekonomi perusahaan (Nurulita & Utami, 2024). Laba sendiri berfungsi sebagai indikator utama untuk menilai keberhasilan operasional perusahaan serta dasar pengambilan keputusan investasi. Oleh karena itu, pengelolaan laba yang bijak dapat berkontribusi terhadap reputasi keuangan yang sehat dan peningkatan kepercayaan investor tanpa melanggar prinsip akuntansi maupun ketentuan perpajakan yang berlaku.

Fenomena praktik manajemen laba juga terlihat pada perusahaan besar di Indonesia. Misalnya, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk mencatatkan pendapatan konsolidasi sebesar Rp150 triliun dengan laba bersih Rp23,6 triliun pada tahun 2024, yang ditopang oleh strategi transformasi bisnis “Five Bold Moves”, efisiensi operasional, serta diversifikasi pendapatan digital. Strategi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan manajerial dalam pengaturan kinerja keuangan tidak selalu bersifat oportunistik, tetapi dapat menjadi bagian dari tata kelola keuangan yang sah dan terukur untuk menjaga kesinambungan investasi jangka panjang.

Salah satu faktor penting yang mendorong perusahaan melakukan praktik manajemen laba adalah strategi perpajakan, khususnya perencanaan pajak dan pengelolaan beban pajak tangguhan. Perencanaan pajak (tax planning) merupakan strategi yang digunakan untuk meminimalkan beban pajak secara legal melalui pemanfaatan ketentuan fiskal yang berlaku (Khairunnisa et al., 2020). Strategi ini tidak hanya berfungsi sebagai alat efisiensi biaya, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam pengambilan keputusan keuangan perusahaan. Tujuannya adalah untuk menekan beban pajak serendah mungkin guna memaksimalkan laba setelah pajak, yang pada gilirannya dapat memengaruhi keputusan manajemen dalam menyajikan laporan keuangan.

Sementara itu, beban pajak tangguhan (deferred tax expense) muncul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi dan laba fiskal yang menimbulkan kewajiban atau aset pajak tangguhan yang akan direalisasikan pada periode mendatang. Pos ini memiliki peran penting dalam mencerminkan kewajiban pajak yang belum dibayar dan memberikan ruang bagi manajemen untuk mengatur waktu pengakuan pendapatan atau beban (Gulo & Mappadang, 2022). Oleh karena itu, beban pajak tangguhan sering dipandang sebagai salah satu indikator potensial adanya praktik manajemen laba melalui mekanisme *income smoothing*.

Namun demikian, hasil penelitian terdahulu mengenai hubungan antara perencanaan pajak, beban pajak tangguhan, dan manajemen laba masih menunjukkan inkonsistensi. (Pratiwi, 2025) menemukan bahwa perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap manajemen laba, sedangkan (Dewi et al., 2022) menunjukkan pengaruh negatif, dan (Gulo & Mappadang, 2022) menemukan bahwa keduanya tidak berpengaruh signifikan. Perbedaan hasil juga ditemukan dalam variabel beban pajak tangguhan (P. I. Dewi & Djohar, 2023) menunjukkan pengaruh positif terhadap manajemen laba, (Nurulita & Utami, 2024) menemukan pengaruh negatif, sementara (Puri et al., 2024) menyatakan tidak terdapat pengaruh. Inkonsistensi ini mengindikasikan adanya variabel kontekstual yang memoderasi hubungan antarvariabel tersebut.

Beban pajak tangguhan (deferred tax expense) juga menjadi aspek penting dalam laporan keuangan karena menunjukkan adanya perbedaan temporer antara laba akuntansi dan laba fiskal. Perbedaan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengatur waktu pengakuan pendapatan dan biaya guna memengaruhi laba bersih perusahaan (Hanlon & Heitzman, 2010). Manajemen pajak dan pengakuan beban pajak tangguhan berpotensi menjadi alat dalam praktik manajemen laba (earnings management).

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa perusahaan dengan perencanaan pajak yang agresif lebih cenderung melakukan manajemen laba (Chen et al., 2010; Noor et al., 2010). Namun, hasil studi lain menunjukkan bahwa perencanaan pajak yang baik justru meningkatkan efisiensi pajak tanpa indikasi manipulasi laba (Desai & Dharmapala, 2009). Ketidakkonsistenan hasil penelitian tersebut mendorong pentingnya studi literatur yang mendalam dalam konteks subsektor farmasi di Indonesia.

Konteks industri farmasi di Indonesia memberikan landasan empiris yang relevan untuk mengkaji isu ini lebih dalam. Industri farmasi merupakan yang terbesar di kawasan ASEAN, dengan nilai pasar mencapai Rp120 triliun pada tahun 2023 dan tingkat pertumbuhan tahunan 8–10%. Pertumbuhan tersebut didorong oleh populasi besar (275 juta jiwa), meningkatnya kesadaran kesehatan pascapandemi, serta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang mencakup 230 juta peserta. Di sisi lain, tekanan untuk memenuhi ekspektasi laba di tengah persaingan ketat antara perusahaan lokal seperti Kalbe Farma dan Indofarma serta perusahaan multinasional seperti Sanofi dan Pfizer berpotensi mendorong praktik manajemen laba. Sebanyak 60% perusahaan farmasi Indonesia terdaftar di BEI, dengan kepemilikan institusional 45–60%, yang menimbulkan tekanan terhadap manajemen untuk memenuhi target laba melalui kebijakan akrual diskresioner.

Perbedaan karakteristik industri, strategi keuangan, serta kebijakan perpajakan antarperusahaan menciptakan peluang penelitian yang menarik untuk dianalisis lebih lanjut. Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengisi celah penelitian (*research gap*) terkait pengaruh perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan terhadap praktik manajemen laba, khususnya pada perusahaan subsektor farmasi di Indonesia. Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dalam memperkuat pemahaman mengenai keterkaitan antara strategi perpajakan dan perilaku pelaporan keuangan perusahaan, sekaligus menjadi bahan pertimbangan bagi regulator dan investor dalam menilai kualitas informasi keuangan yang disajikan.

Berdasarkan uraian latar belakang dan hasil kajian teoretis yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa praktik manajemen laba merupakan fenomena kompleks yang tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal perusahaan, tetapi juga oleh kebijakan fiskal yang diterapkan melalui perencanaan pajak dan pengelolaan beban pajak

tanggungan. Perbedaan hasil temuan empiris sebelumnya menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperdalam analisis dalam konteks industri tertentu, khususnya subsektor farmasi yang memiliki karakteristik regulasi dan dinamika pasar yang unik. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris terhadap pengembangan literatur akuntansi keuangan, memperkaya pemahaman mengenai perilaku pelaporan keuangan perusahaan, serta memberikan rekomendasi bagi regulator, investor, dan praktisi dalam meningkatkan transparansi dan kualitas pelaporan keuangan di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur (*literature review*) sebagai metode utama untuk mencapai tujuan penelitian, yaitu menelaah secara mendalam dan menyusun kembali pemahaman konseptual mengenai keterkaitan antara perencanaan pajak, beban pajak tanggungan, dan praktik manajemen laba dalam industri farmasi. Pendekatan ini dipilih karena memberikan ruang bagi peneliti untuk memperoleh perspektif yang luas serta mendalam terhadap konsep, teori, dan hasil temuan penelitian sebelumnya yang relevan dengan fokus kajian.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui pencarian literatur secara sistematis terhadap artikel-artikel ilmiah yang dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal internasional bereputasi. Pencarian dilakukan dengan memanfaatkan perangkat lunak Publish or Perish (PoP) yang digunakan untuk menelusuri dan mengumpulkan publikasi dari berbagai sumber seperti Google Scholar, Scopus, dan ScienceDirect. Seleksi artikel dilakukan berdasarkan beberapa kriteria, yaitu: (1) artikel yang mengulas variabel utama penelitian perencanaan pajak, beban pajak tanggungan, dan manajemen laba; (2) penelitian yang relevan dengan sektor industri farmasi atau industri sejenis; (3) diterbitkan dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir; serta (4) artikel tersedia secara lengkap untuk dianalisis secara menyeluruh.

Selanjutnya, analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) (Zuchdi, 1993), yaitu suatu teknik yang berfungsi untuk menafsirkan isi komunikasi secara sistematis dan objektif guna memperoleh pemahaman yang mendalam. Dalam konteks penelitian ini, analisis isi dimaknai sebagai pendekatan sistematis untuk menelaah, mengelompokkan, serta menafsirkan pola hubungan konseptual antara variabel perencanaan pajak, beban pajak tanggungan, dan manajemen laba sebagaimana tercermin dalam hasil penelitian terdahulu.

3. Hasil dan Diskusi

Temuan Penelitian

A. Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan langkah strategis yang dilakukan perusahaan untuk mengelola kewajiban pajak secara efisien dengan tetap berada dalam batas-batas hukum yang berlaku. Konsep ini mencakup berbagai upaya sistematis guna mengurangi beban pajak melalui pengaturan waktu pengakuan pendapatan, penundaan beban (*deferral*), serta pemanfaatan peluang yang terdapat dalam ketentuan perpajakan (Hanlon & Heitzman, 2010). Strategi tersebut tidak hanya berdampak pada jumlah pajak yang harus dibayarkan, tetapi juga berpengaruh terhadap waktu pelaporan laba dalam laporan keuangan perusahaan. Dalam perspektif keuangan korporasi, perencanaan pajak dianggap sebagai bagian dari keputusan strategis yang bertujuan meningkatkan nilai perusahaan tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku (Desai & Dharmapala, 2009).

Dalam konteks Indonesia, praktik perencanaan pajak difokuskan pada pengaturan aktivitas bisnis dan kebijakan akuntansi agar perusahaan dapat menekan beban pajak secara legal. Proses ini dapat dilakukan melalui pemilihan metode depresiasi yang tepat, pengaturan pengakuan pendapatan, serta pemanfaatan fasilitas fiskal seperti *tax holiday* atau *super deduction tax*. (Hanlon, 2005) menegaskan bahwa adanya perbedaan antara laba komersial dan laba fiskal sering kali mencerminkan strategi manajerial dalam mengatur beban pajak antarsiklus akuntansi, yang secara tidak langsung menunjukkan adanya upaya perencanaan pajak.

Hasil penelitian empiris menunjukkan bahwa perencanaan pajak memainkan peran signifikan dalam pengelolaan laba. (Noor, Fadzillah, dan Mastuki, 2010) mengidentifikasi bahwa kebijakan perencanaan pajak berpengaruh terhadap tingkat *effective tax rate (ETR)* perusahaan, yang merupakan indikator efisiensi fiskal. Temuan serupa diungkapkan (Sariguna, Johnson, dan Tobing, 2020) yang menjelaskan bahwa perusahaan yang melakukan

perencanaan pajak memiliki fleksibilitas lebih besar dalam menyusun laporan laba, meskipun tindakan tersebut dapat menimbulkan risiko manipulasi bila dilakukan secara agresif. Penelitian (Herdiandyah, Septiawan, dan Ikhsan, 2022) juga menunjukkan adanya hubungan positif antara perencanaan pajak dan praktik manajemen laba, terutama ketika manajemen memanfaatkan teknik akuntansi tertentu untuk menunda pengakuan beban pajak. Penelitian (Hani, 2010) untuk mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak digunakan indikator kepatuhan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK. 04/2000 Jo 235/KMK. 03/2003, secara umum sudah dijalankan oleh sebagian besar wajib pajak, hanya butir keenam terkait dengan pemeriksaan oleh akuntan public belum dilaksanakan oleh wajib pajak badan. Penelitian (Husna, 2024) menemukan bahwa individu dengan penalaran moral yang tinggi cenderung lebih mungkin melaporkan pelanggaran, bahkan dalam ketiadaan insentif eksternal. Penelitian (Husna, 2024) menemukan bahwa individu dengan penalaran moral yang tinggi cenderung lebih mungkin melaporkan pelanggaran, bahkan dalam ketiadaan insentif eksternal.

Selanjutnya, hasil penelitian (Bunaca dan Nurdyadi, 2019) memperlihatkan bahwa integrasi antara strategi perencanaan pajak dan pengelolaan beban pajak tangguhan dapat berdampak pada peningkatan profitabilitas perusahaan. Dalam industri farmasi, kompleksitas perencanaan pajak semakin meningkat karena adanya kebijakan insentif fiskal yang terkait dengan kegiatan penelitian dan pengembangan (*research and development/R&D*). Kondisi tersebut menegaskan bahwa perencanaan pajak bukan hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga merupakan bagian dari strategi korporasi dalam mempertahankan daya saing dan stabilitas keuangan perusahaan di pasar global.

Secara keseluruhan, perencanaan pajak memiliki peranan yang substansial dalam menjaga efisiensi keuangan perusahaan sekaligus dapat memengaruhi praktik manajemen laba. Keberhasilan strategi ini sangat dipengaruhi oleh penerapan prinsip *good corporate governance*, di mana transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci utama dalam menyeimbangkan efisiensi pajak dengan integritas pelaporan keuangan (Hanlon & Heitzman, 2010; Desai & Dharmapala, 2009).

B. Beban Pajak Tangguhan

Beban pajak tangguhan (*deferred tax expense*) muncul karena perbedaan temporer antara pengakuan laba menurut prinsip akuntansi komersial dan dasar pengenaan pajak fiskal; perbedaan-perbedaan itu menghasilkan aset atau liabilitas pajak tangguhan yang memengaruhi beban pajak periode berjalan dan masa datang (Hanlon & Heitzman, 2010). Secara konseptual, akun pajak tangguhan merefleksikan ekspektasi manajerial atas konsekuensi fiskal dari kebijakan akuntansi yang telah diadopsi, sehingga ia bukan sekadar item teknis tetapi menyimpan informasi ekonomi yang relevan bagi pengguna laporan keuangan.

Studi klasik menempatkan beban pajak tangguhan sebagai alat yang berguna untuk mendeteksi praktik manajemen laba karena keputusan akuntansi yang bersifat diskresioner seringkali menciptakan perbedaan buku-pajak yang meningkatkan beban pajak tangguhan (Phillips, Pincus, & Rego, 2003). Hasil empiris Phillips et al. menunjukkan bahwa perubahan abnormal pada beban pajak tangguhan berkorelasi dengan upaya manajemen untuk menghindari rugi atau menahan penurunan laba, sehingga DTE (*deferred tax expense*) dapat berperan sebagai proksi tambahan dalam penelitian *earnings management* selain ukuran akrual tradisional.

Hubungan antara beban pajak tangguhan dan agresivitas pelaporan pajak/perilaku pelaporan keuangan juga didukung oleh bukti yang menghubungkan *tax reporting aggressiveness* dengan *aggressive financial reporting* (Frank, Lynch, & Rego, 2009). Temuan ini memperkuat argumen bahwa perbedaan temporer dan pengelolaan akun pajak tidak dapat dipisahkan dari motif manajerial untuk mengatur laba yang dilaporkan—baik melalui kebijakan akuntansi maupun melalui keputusan fiskal jangka pendek.

Namun, sintesis penelitian yang lebih luas menunjukkan hasil yang lebih nuansa: kajian sistematis terbaru menemukan bahwa, walau berbagai item pajak tangguhan memiliki nilai informatif (*value relevance*), bukti bahwa perusahaan secara konsisten memanfaatkan *deferred tax items* untuk *mengelola* laba relatif terbatas dan bergantung pada setting institusional (Görlitz & Dobler, 2021). Dengan kata lain, DTE dapat menjadi sinyal manajemen laba pada beberapa konteks, tetapi bukanlah bukti tunggal; konteks negara, standar akuntansi, dan kualitas pengungkapan menentukan kekuatan sinyal tersebut.

Penelitian yang menguji reaksi pengguna laporan juga memperlihatkan signifikansi perubahan tidak lazim pada akun pajak tangguhan. Xue (2022) menemukan bahwa perubahan abnormal pada aset pajak tangguhan (*deferred tax assets*) dapat mengganggu akurasi dan kemampuan prediktif prakiraan analis; perubahan positif abnormal pada

DTA cenderung mengurangi kualitas prakiraan analis, yang menunjukkan bahwa pasar/analisis kadang memandang perubahan DTA sebagai kemungkinan indikasi manuver manajerial atau ketidakpastian fundamental. Temuan ini menegaskan bahwa DTA/DTE menyimpan informasi yang diperhatikan oleh pemangku kepentingan eksternal.

Beberapa studi lintas sektoral dan sektoral menampilkan heterogenitas hasil: Choi, Hu, dan Karim (2020) menunjukkan bahwa konsistensi book-tax differences memengaruhi kualitas prakiraan analis, sementara penelitian sektor-spesifik (mis. farmasi atau industri padat R&D) melaporkan bahwa intensitas R&D dan perlakuan fiskal terhadap biaya penelitian meningkatkan perbedaan temporer sehingga membuat akun pajak tangguhan lebih material dan berpotensi dimanfaatkan untuk smoothing laba (Choi et al., 2020; Sariguna, Johnson, & Tobing, 2020). Dengan demikian, karakteristik industri menjadi faktor kunci ketika menilai apakah DTE merefleksikan praktik oportunistik atau sekadar konsekuensi ekonomi.

Selain itu, literatur empiris yang lebih baru mengindikasikan bahwa efek DTE terhadap manajemen laba sering bermakna ketika dianalisis bersamaan dengan variabel pajak lain (mis. deferred tax assets), pengukuran perencanaan pajak (*tax planning*), dan variabel moderasi seperti tarif pajak atau tata kelola perusahaan (Görlitz & Dobler, 2021; Xue, 2022). Pendekatan multivariat semacam ini lebih tepat untuk menangkap dinamika sebab-akibat karena DTE sendiri mudah dipengaruhi oleh kebijakan depresiasi, pengakuan pendapatan, provisi cadangan, ataupun insentif fiskal.

Ringkasnya, bukti teoritis dan empiris menempatkan beban pajak tangguhan sebagai akun yang informatif dan berpotensi terkait dengan praktik manajemen laba, tetapi kekuatan hubungan itu kontekstual: bergantung pada standar akuntansi, struktur perpajakan, karakteristik industri (mis. intensitas R&D) serta kualitas pengungkapan dan pengawasan. Untuk penelitian yang memfokuskan subsektor farmasi, implikasinya jelas — peneliti perlu menguji DTE bersama indikator perencanaan pajak, DTA, dan ukuran tata kelola agar dapat membedakan antara sinyal ekonomi yang sah dan praktik oportunistik dalam pengelolaan laba.

C. Manajemen Laba

Manajemen laba didefinisikan sebagai tindakan manajerial yang sengaja mempengaruhi pelaporan keuangan untuk mencapai tujuan tertentu, misalnya mencapai target laba, memenuhi ekspektasi pasar, atau mengurangi volatilitas laba (Healy & Wahlen, 1999). Literatur dasar menunjukkan dua bentuk utama manajemen laba: melalui akrual diskresioner (*accrual-based earnings management*) dan melalui aktivitas nyata perusahaan (*real activities manipulation*), masing-masing memiliki mekanisme, konsekuensi, dan indikator empiris berbeda (Dechow, Sloan, & Sweeney, 1995; Roychowdhury, 2006). Pemahaman perbedaan mekanisme ini penting karena strategi yang dipilih manajemen dipengaruhi oleh insentif kontraktual, pengawasan tata kelola, dan kondisi pasar modal.

Akrual diskresioner telah menjadi dasar banyak studi empiris karena dapat diestimasi dengan model ekonometrika (mis. model Jones dan modifikasinya) untuk mendeteksi komponen akrual yang bersifat oportunistik (Jones, 1991; Dechow et al., 1995). Penelitian-penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan akrual diskresioner sering dikaitkan dengan upaya manajemen untuk memuluskan laba, menghindari pelanggaran covenant, atau memaksimalkan bonus manajerial. Namun, interpretasi akrual diskresioner harus dilakukan hati-hati karena akrual juga dapat mencerminkan perbedaan ekonomi nyata, bukan hanya manipulasi.

Selain akrual, manipulasi melalui aktivitas nyata seperti pengurangan pengeluaran R&D, pemangkasan iklan, atau perubahan kebijakan kredit untuk mendorong penjualan jangka pendek telah diidentifikasi sebagai saluran penting untuk mengelola laba (Roychowdhury, 2006). Strategi *real activities manipulation* sering meninggalkan jejak operasional dan berdampak pada arus kas nyata serta kinerja jangka panjang perusahaan, sehingga konsekuensinya berbeda dari akrual diskresioner yang lebih mudah dibalik pada periode berikutnya.

Literatur teoritis juga menekankan motivasi internal dan eksternal di balik praktik manajemen laba. Teori insentif (bonus, kontrak hutang, dan kepemilikan manajerial) dan tekanan pasar (kebutuhan memenuhi ekspektasi analis/market) adalah pendorong utama, sementara faktor penghambat termasuk tata kelola perusahaan yang efektif, peran auditor independen, dan pengawasan regulator (Watts & Zimmerman, 1986; Healy & Wahlen, 1999). Studi empiris lintas negara menunjukkan hubungan negatif antara kualitas tata kelola dan intensitas manajemen laba, menegaskan peran mekanisme pengawasan dalam menekan praktik oportunistik.

Metodologi pengukuran manajemen laba terus berkembang: selain model akrual klasik (Jones, Modified Jones), penelitian kontemporer menggabungkan pengukuran perilaku nyata (Roychowdhury, 2006), analisis teks pengungkapan, dan teknik machine learning untuk mendeteksi pola non-linier. Pengembangan metodologis ini penting karena memungkinkan pembedaan antara manuver manajerial yang bersifat sementara dan penyimpangan yang berdampak jangka panjang terhadap nilai perusahaan.

Bukti empiris kontekstual memberikan nuansa: beberapa penelitian menemukan praktik manajemen laba lebih intens pada perusahaan yang menghadapi tekanan pasar tinggi atau kelemahan tata kelola, sedangkan penelitian lainnya menunjukkan bahwa di beberapa industri (mis. industri padat regulasi atau padat R&D) sinyal akrual dan real activities dapat terdistorsi oleh faktor industri, sehingga interpretasi memerlukan kontrol kontekstual (Burgstahler & Dichev, 1997; Choi, Hu, & Karim, 2020). Oleh karena itu, studi sektoral (mis. subsektor farmasi) sering direkomendasikan untuk menangkap heterogenitas perilaku pelaporan.

Peran pajak dan perbedaan buku-pajak (book-tax differences) juga semakin mendapatkan perhatian dalam penelitian manajemen laba; beberapa studi menunjukkan bahwa strategi pajak (tax planning) dan akun pajak tangguhan dapat dirancang atau dimanfaatkan untuk tujuan pelaporan laba, sehingga analisis manajemen laba perlu memasukkan variabel-variabel pajak untuk menangkap semua saluran manipulasi (Hanlon & Heitzman, 2010; Phillips, Pincus, & Rego, 2003). Integrasi dimensi pajak penting khususnya di negara dengan aturan fiskal yang memberi ruang diskresi atau insentif sektoral.

Secara sintesis, kajian teoritis dan empiris menempatkan manajemen laba sebagai fenomena multidimensional yang dipengaruhi oleh insentif ekonomi, struktur tata kelola, karakteristik industri, dan kebijakan fiskal. Penelitian masa depan dianjurkan menggunakan desain panel longitudinal, pengukuran gabungan (akrual + real activities), serta kontrol kuat atas faktor industri dan tata kelola agar dapat membedakan antara manajemen laba yang bersifat opportunistik dan praktik-praktik pelaporan yang mencerminkan kebutuhan ekonomi nyata. Untuk studi yang berfokus pada subsektor farmasi, pendekatan tersebut sangat relevan karena intensitas R&D, insentif pajak sektor, dan regulasi industri dapat memperbesar kompleksitas interpretasi sinyal pelaporan.

Pembahasan

Telaah literatur mengungkapkan bahwa perencanaan pajak atau *tax planning* merupakan salah satu strategi utama perusahaan dalam mengelola kewajiban fiskal. Selain menurunkan beban pajak secara legal, strategi ini juga berperan dalam memengaruhi pengakuan laba akuntansi (Hanlon & Heitzman, 2010). Di sektor farmasi, kompleksitas praktik perencanaan pajak meningkat karena perusahaan menghadapi transaksi lintas negara, aktivitas penelitian dan pengembangan (R&D), serta regulasi harga obat yang memengaruhi biaya dan pendapatan (Slemrod, 2019). Dengan demikian, perencanaan pajak tidak hanya berfokus pada efisiensi fiskal, tetapi juga pada stabilitas laporan keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan industri.

Berbagai studi internasional dan nasional menunjukkan bahwa perusahaan farmasi cenderung menerapkan *aggressive tax planning*, terutama dalam pengakuan pendapatan dan perlakuan biaya riset yang memiliki perlindungan pajak khusus (Chen et al., 2010). Perbedaan temporer antara laba akuntansi dan laba fiskal sering dimanfaatkan untuk menunda beban pajak, yang kemudian menghasilkan beban pajak tangguhan (*deferred tax expense*). Mekanisme ini memberikan fleksibilitas bagi manajemen untuk mengatur waktu pengakuan laba sesuai kondisi keuangan perusahaan (Hanlon, 2005), sehingga perencanaan pajak dapat menjadi alat untuk menstabilkan laba (*earnings smoothing*).

Secara empiris, beban pajak tangguhan mencerminkan perbedaan waktu antara pengakuan pendapatan dan biaya untuk tujuan akuntansi dan fiskal. Penelitian terdahulu menemukan adanya hubungan positif antara beban pajak tangguhan dan praktik manajemen laba (*earnings management*) (Blaylock et al., 2012; Tang & Firth, 2011). Beban pajak tangguhan memungkinkan manajemen menyesuaikan laba yang dilaporkan tanpa melanggar prinsip akuntansi. Di sektor farmasi, pengakuan beban pajak tangguhan sering digunakan sebagai strategi untuk mengendalikan margin keuntungan dan menjaga persepsi stabilitas kinerja di mata investor serta regulator.

Analisis literatur juga menunjukkan hubungan saling melengkapi antara perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan dalam pengelolaan laba. Noor et al. (2010) menekankan bahwa semakin intensif strategi perencanaan pajak diterapkan, semakin besar kemungkinan terciptanya perbedaan temporer yang memunculkan beban pajak tangguhan. Herdiansyah et al. (2022) menambahkan bahwa beban pajak tangguhan dapat digunakan sebagai

indikator atas keputusan manajemen dalam mengatur beban pajak antarperiode, sehingga memengaruhi stabilitas laba bersih. Hubungan ini menunjukkan interaksi dinamis antara strategi fiskal dan kebijakan akuntansi perusahaan.

Namun, tidak semua interaksi ini bersifat positif. Penelitian lain menunjukkan bahwa perencanaan pajak yang agresif dapat menimbulkan risiko reputasi dan mengganggu stabilitas laba jangka panjang (Frank, Lynch, & Rego, 2009). Di sektor farmasi, yang diawasi ketat oleh otoritas pajak dan publik, manipulasi beban pajak tangguhan sebagai bentuk manajemen laba dapat menurunkan kepercayaan investor. Oleh karena itu, penerapan prinsip good corporate governance (GCG) sangat penting untuk mencegah praktik manajemen laba yang berlebihan (Desai & Dharmapala, 2009).

Literatur juga menyoroti peran pengawasan auditor sebagai faktor yang memoderasi hubungan antara perencanaan pajak dan manajemen laba. Penelitian oleh Minnick dan Noga (2010) serta Sariguna et al. (2020) menunjukkan bahwa perusahaan dengan pengawasan eksternal yang kuat cenderung memiliki praktik manajemen laba yang lebih terkendali. Auditor independen berperan menilai kewajaran pengakuan beban pajak tangguhan, terutama terkait biaya penelitian dan amortisasi paten, sehingga kualitas audit menjadi elemen penting dalam menjaga keseimbangan antara efisiensi pajak dan integritas laporan keuangan.

Selain pengawasan auditor, regulasi perpajakan juga memengaruhi hubungan antara perencanaan pajak, beban pajak tangguhan, dan manajemen laba. Kebijakan *super deduction tax* untuk R&D dan perubahan tarif pajak badan dapat mempengaruhi penghitungan aset dan liabilitas pajak tangguhan. Bunaca dan Nurduyadi (2019) menemukan bahwa perubahan kebijakan fiskal dapat menimbulkan volatilitas pada beban pajak tangguhan, yang berimplikasi pada stabilitas laba bersih. Dengan demikian, perusahaan farmasi perlu menyesuaikan strategi perencanaan pajak agar tetap selaras dengan regulasi dan tidak menimbulkan distorsi laporan keuangan.

Telaah literatur ini mengindikasikan adanya suatu siklus yang menghubungkan perencanaan pajak, beban pajak tangguhan, dan manajemen laba. Perencanaan pajak berfungsi sebagai input strategis, beban pajak tangguhan sebagai mekanisme pengaturan waktu, dan manajemen laba sebagai output yang mencerminkan efektivitas strategi. Model ini menunjukkan bahwa pengelolaan laba di sektor farmasi merupakan hasil interaksi kompleks antara kebijakan fiskal, praktik akuntansi, dan regulasi industri, sehingga integrasi antara strategi pajak dan etika akuntansi menjadi penting.

Keseluruhan temuan literatur menegaskan bahwa praktik manajemen laba pada perusahaan subsektor farmasi sangat dipengaruhi oleh interaksi antara perencanaan pajak dan pengakuan beban pajak tangguhan. Hubungan tersebut bersifat kontekstual, dipengaruhi oleh regulasi, tata kelola, dan tekanan pasar. Penelitian empiris lebih lanjut diperlukan untuk menguji model konseptual yang direkonstruksi dari studi literatur ini, sehingga dapat memberikan panduan bagi praktik pengelolaan laba yang etis, transparan, dan sesuai prinsip akuntansi modern.

4. Kesimpulan

Berdasarkan telaah literatur, perencanaan pajak (*tax planning*) berperan sebagai strategi penting bagi perusahaan farmasi untuk mengelola kewajiban pajak sekaligus memengaruhi pengakuan laba akuntansi. Beban pajak tangguhan (*deferred tax expense*) muncul sebagai akibat dari perbedaan temporer antara laba akuntansi dan laba fiskal, dan sering dimanfaatkan oleh manajemen untuk menyesuaikan waktu pengakuan laba. Hubungan antara perencanaan pajak, beban pajak tangguhan, dan manajemen laba membentuk mekanisme pengelolaan laba yang memungkinkan perusahaan menjaga stabilitas laporan keuangan tanpa melanggar prinsip akuntansi. Interaksi ketiga variabel ini bersifat kontekstual dan dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun internal, termasuk regulasi perpajakan, pengawasan auditor, dan penerapan prinsip good corporate governance. Strategi pajak yang agresif tanpa pengendalian yang memadai berpotensi menimbulkan risiko reputasi serta distorsi laba. Oleh karena itu, integrasi antara efisiensi pajak dan tata kelola yang baik menjadi kunci dalam memastikan praktik manajemen laba tetap transparan dan bertanggung jawab. Secara konseptual, perencanaan pajak berfungsi sebagai input strategis, beban pajak tangguhan sebagai mekanisme pengaturan waktu, dan manajemen laba sebagai output yang mencerminkan efektivitas strategi perusahaan. Temuan literatur ini memberikan dasar untuk penelitian empiris lanjutan yang dapat menguji model konseptual tersebut. Hasil penelitian lebih lanjut diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori akuntansi pajak serta praktik pengelolaan laba yang etis, transparan, dan sesuai prinsip akuntansi modern di industri farmasi.

Referensi

1. Andani, A. T. (2024). *The Effect of Deferred Tax Charge, Deferred Tax Assets, and Tax Planning on Earnings Management*. IJEBAR: International Journal of Economics, Business, and Accounting Research.
2. Bunaca, R. A., & Nurduyadi. (2019). The impact of deferred tax expense and tax planning toward earnings management and profitability. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 21(2), 215–236. <https://doi.org/10.34208/jba.v21i2.625>
3. Burgstahler, D., & Dichev, I. (1997). Earnings management to avoid earnings decreases and losses. *Journal of Accounting and Economics*, 24(1), 99–126.
4. Chen, S., Chen, X., & Cheng, Q. (2010). Are family firms more tax aggressive than non-family firms? *Journal of Financial Economics*, 95(1), 41–61. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2009.02.003>
5. Chen, S., Chen, X., Cheng, Q., & Shevlin, T. (2010). Are family firms more tax aggressive than non-family firms? *Journal of Financial Economics*, 95(1), 41–61. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2009.02.003>
6. Choi, H., Hu, R., & Karim, K. E. (2020). The effect of consistency in book-tax differences on analysts' earnings forecasts: Evidence from forecast accuracy and informativeness. *Journal of Accounting and Public Policy*, 39(3), Article 106740. (Elsevier). <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2020.106740>.
7. Choi, H., Hu, R., & Karim, K. E. (2020). The effect of consistency in book-tax differences on analysts' earnings forecasts. *Journal of Accounting and Public Policy*, 39, Article 106740. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2020.106740>
8. Dechow, P. M., Sloan, R. G., & Sweeney, A. P. (1995). Detecting earnings management. *The Accounting Review*, 70(2), 193–225.
9. Desai, M. A., & Dharmapala, D. (2009). Corporate tax avoidance and firm value. *The Review of Economics and Statistics*, 91(3), 537–546. <https://doi.org/10.1162/rest.91.3.537>
10. Frank, M. M., Lynch, L. J., & Rego, S. O. (2009). Tax reporting aggressiveness and its relation to aggressive financial reporting. *The Accounting Review*, 84(2), 467–496. <https://doi.org/10.2308/accr.2009.84.2.467>.
11. Frank, M. M., Lynch, L. J., & Rego, S. O. (2009). Tax reporting aggressiveness and its relation to aggressive financial reporting. *The Accounting Review*, 84(2), 467–496.
12. Frank, M. M., Lynch, L. J., & Rego, S. O. (2009). Tax reporting aggressiveness and its relation to aggressive financial reporting. *The Accounting Review*, 84(2), 467–496. <https://doi.org/10.2308/accr.2009.84.2.467>
13. Görlitz, A., & Dobler, M. (2021). Financial accounting for deferred taxes: A systematic review of empirical evidence. *Management Review Quarterly* (Management Rev Q / Springer). <https://doi.org/10.1007/s11301-021-00233-w>.
14. Gulo, M. M., & Mappadang, A. (2022). *The Effect of Deferred Tax Expenses, Deferred Tax Assets and Tax Planning on Earnings Management*. *Ultima Accounting*, 14(1), 162–175.
15. Hani, S., & Lubis, M. R. (2010). *Pengaruh karakteristik perusahaan terhadap kepatuhan wajib pajak*. JRAB: Jurnal Riset Akuntansi & Bisnis, 10(1).
16. Hanlon, M. (2005). The persistence and pricing of earnings, accruals, and cash flows when firms have large book-tax differences. *The Accounting Review*, 80(1), 137–166. <https://doi.org/10.2308/accr.2005.80.1.137>
17. Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A review of tax research. *Journal of Accounting and Economics*, 50(2–3), 127–178. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.09.002>
18. Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A review of tax research. *Journal of Accounting and Economics*, 50(2–3), 127–178. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.09.001>
19. Healy, P. M., & Wahlen, J. M. (1999). A review of the earnings management literature and its implications for standard setting. *Accounting Horizons*, 13(4), 365–383.
20. Herdiansyah, E., Septiawan, B., & Ikhsan, S. (2022). The effect of tax planning and deferred tax expense on earnings management. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 5(1), 238–245. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i1.2259>
21. Herdiansyah, E., Septiawan, M., & Suryani, D. (2022). The effect of tax planning and deferred tax expense on earnings management. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 19(2), 123–135. <https://doi.org/10.21002/jaki.2022.08>
22. Husna, A. (2024). *Peran penalaran moral dalam perspektif Islam terhadap whistleblowing*. AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam, 9(1), 85–96.
23. Jones, J. J. (1991). Earnings management during import relief investigations. *Journal of Accounting Research*, 29(2), 193–228.
24. Khairunnisa, J. M., Majidah, & Kurnia. (2020). *Manajemen Laba: Financial Distress, Perencanaan Pajak, Ukuran Perusahaan, Komite Audit dan Kualitas Audit*. JIMEA : Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi), 4(3), 1114–1131.
25. Minnick, K. M., & Noga, T. (2010). Do corporate governance characteristics influence tax management? *Journal of Corporate Finance*, 16(5), 703–718. <https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2010.07.003>
26. Noor, M. N. M., & Mohd, N. F. (2010). The relationship between tax planning and earnings management: Evidence from Malaysia. *International Journal of Economics and Management*, 4(2), 324–340. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1580803>
27. Noor, R. M., Fadzillah, N. S. M., & Mastuki, N. (2010). Corporate tax planning: A study on corporate effective tax rates of Malaysian listed companies. *International Journal of Trade, Economics and Finance*, 1(2), 189–193. <https://doi.org/10.7763/IJTEF.2010.V1.34>
28. Nurulita, S., & Utami, T. (2024). *Pengaruh Perencanaan Pajak, Beban Pajak Tangguhan, dan Financial Distress Terhadap Manajemen Laba*. AKUA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 3(1), 1–11. <https://doi.org/10.54259/akua.v3i1.2074>
29. Phillips, J. D., Pincus, M., & Rego, S. O. (2003). *Earnings management: New evidence based on deferred tax expense*. *The Accounting Review*, 78(2), 491–521. (tersedia versi working paper / SSRN). <https://ssrn.com/abstract=276997>
30. Phillips, J. D., Pincus, M., & Rego, S. O. (2003). Earnings management: New evidence based on deferred tax expense. *The Accounting Review*, 78(2), 491–521.
31. Putri Istiana Dewi, Kodriyah, & Haryadi, E. (2023). *Pengaruh Beban Pajak Tangguhan, Perencanaan Pajak dan Kompensasi Bonus Terhadap Manajemen Laba*. *Lawsuit: Jurnal Perpajakan*, 2(1), 47–59.
32. Roychowdhury, S. (2006). Earnings management through real activities manipulation. *Journal of Accounting and Economics*, 42(3), 335–370.
33. Sariguna, P., Johnson, K., & Tobing, E. G. M. (2020). The effect of tax planning on earnings management. *Asia Pacific Fraud Journal*, 8(2), 298. <https://doi.org/10.21532/apfjournal.v8i2.298>
34. Slemrod, J. (2019). Tax compliance and enforcement. *Journal of Economic Literature*, 57(4), 904–954. <https://doi.org/10.1257/jel.20181437>
35. Tang, T., & Firth, M. (2011). Can book-tax differences capture earnings management and tax avoidance? Empirical evidence from China. *The International Journal of Accounting*, 46(2), 175–204. <https://doi.org/10.1016/j.intacc.2011.04.005>

36. Xue, Y. (2022). Does an abnormal change in deferred tax assets interfere with analysts' earnings forecasts? *China Journal of Accounting Research*, 15(3), 100255. <https://doi.org/10.1016/j.cjar.2022.100255>.
37. Zogara, I. D. (2025). *The Effect of Tax Planning, Deferred Tax Expense, and Deferred Tax Assets on Earnings Management*. Pertapsi Journal